

No. : 62 /Surat Terbuka_JSKK/XII/2008.

Jakarta, 4 Desember 2008

Hal : **Stagnasi Kasus Pelanggaran HAM
dan sebuah komitmen yang pantas dipertanyakan.**

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono

di -Jakarta.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Salah satu agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum, termasuk di dalamnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama Presiden Soeharto berkuasa (masa lalu). Dengan demikian, setelah rezim otoriter Orde Baru (Orba) tumbang dan Soeharto lengser, siapa pun yang duduk sebagai presiden dan mendukung reformasi, harus komitmen terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini penting untuk diwujudkan, karena membangun peradaban kedepan yang lebih baik, tidak bisa dilepaskan dari pengungkapan kebenaran dan pelurusan sejarah dan yang terpenting adalah pemulihan hak korban, kondisi ini sudah menjadi norma hukum HAM internasional dan sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa di dunia.

Jika kita menyimak kembali perjalanan bangsa ini pasca reformasi 1998, pada era Presiden B.J. Habibie, komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama Presiden Soeharto berkuasa belum terlihat, justru terjadi kasus Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebenarnya mulai menunjukkan komitmen, ditandai dengan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Tanjung Priok dan Timor-Timur serta dukungan politik untuk membuka beberapa kejahatan masa lalu, namun belum diimbangi dengan reformasi di sektor peradilan, sehingga hasilnya masih jauh dari rasa keadilan bagi korban. Sedangkan di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, komitmen untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kembali redup, tuntutan masyarakat tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu begitu kuat, tetapi kekuatan pro-Orba masih menguasai ranah legislatif dan eksekutif.

Terakhir, pada era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, di masa awal pemerintahannya banyak kalangan meragukan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, mengingat Presiden SBY berasal dari TNI- dulu bernama ABRI, sebuah institusi yang di masa Orba sangat kental dengan tindak pelanggaran HAM. Dan kini, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat mengalami stagnasi. Sejak hari ini masa pemerintahan Presiden SBY tinggal 319 hari. Sekiranya janji Bapak SBY kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu betul-betul tulus, tidak sekedar pemanis bibir, apakah mungkin hal itu bisa terlaksana dalam waktu sesingkat itu? Yang jelas, hati para keluarga korban selalu menjerit untuk tidak ingin selalu dibohongi oleh penguasa.

Di sisi yang lain, partai-partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009 dan para calon anggota legislatif (Caleg) baik ditingkat pusat maupun daerah, seharusnya juga memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan agenda reformasi.. Tetapi dalam kenyataannya, banyak parpol warisan Orba meskipun dengan *embel-embel* kata-kata “Paradigma baru”, dalam prakteknya tidak berpihak pada kepentingan keluarga korban, bahkan cenderung menghambat upaya keluarga korban. Dan yang lebih menyakitkan, adanya parpol yang tergolong baru dan lahir dari gerakan reformasi, sama sekali tidak peduli terhadap makna, tujuan dan cita-cita reformasi. Bahkan semakin jelas mulai bersandar pada tokoh yang dahulu memiliki catatan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seharusnya parpol yang demikian berikut para caleg yang bernaung di bawahnya, tidak lagi mendapat simpati rakyat. Sebagai penutup surat singkat ini, kami ingin menanyakan apakah di hari HAM 10 Desember 2008 nanti, Bapak Presiden berkenan menyampaikan sikap yang setulus-tulusnya, yang sejujur-jujurnya, kepada publik terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Jakarta, 4 Desembe 2008.

JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

Tembusan:

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM.